

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palestina merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang masih belum jelas statusnya sebagai sebuah negara, mengingat sengketa wilayah yang masih terus terjadi dengan negara Israel. Perjuangan Palestina dari tahun 1920 sampai sekarang masih berlanjut, Palestina masih berperang dengan Israel dan terus mencari pengakuan dari negara lain. Indonesia termasuk negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dari pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia tidak terlepas dari peran presiden. Dimulai dari dukungan kepada Palestina telah ditunjukkan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tahun 1962: “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”¹ Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia juga aktif dalam forum KAA (Konferensi Asia Afrika) dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dalam KAA, Indonesia memimpin dalam upaya mendukung Palestina.

¹<http://historia.id/modern/sukarno-dan-palestina> diakses pada tanggal 8 April 2016 pukul 15.18 WIB.

Sementara pada Pemerintahan Soeharto Kebijakan Indonesia mendukung Palestina ditandai dengan berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta pada tahun 1989.² Dukungan juga berlanjut pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, beliau pernah bertemu dengan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bidang advokasi Anti-Semitisme untuk kawasan Timur Tengah, yang juga seorang Yahudi di kantor PBNU. Kemudian Diplomat tersebut mengajukan pertanyaan kepada Gus Dur upaya apa yang harus dilakukan untuk mencapai perdamaian Israel – Palestina. Gus Dur pun dengan tegas langsung menjawab: “Tegakkan keadilan dan berikan hak-hak Palestina kepada mereka, baru bicarakan perdamaian!!”.³ Dialog singkat tersebut menegaskan bahwa tegaknya keadilan dan pemenuhan hak-hak rakyat Palestina merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya perdamaian abadi antara Israel dan Palestina yang hendak dicapai dan diperjuangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid.

Pada Era Pemerintahan Megawati Soekarno Putri dukungan kepada rakyat Palestina ditunjukkan melalui pidato resmi di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandakan pentingnya konflik Palestina-Israel segera diakhiri demi terwujudnya perdamaian di Timur

²[http://www.indosejati.com/2016/03/fakta-fakta-kedekatan-indonesia-dengan Palestina.html](http://www.indosejati.com/2016/03/fakta-fakta-kedekatan-indonesia-dengan-Palestina.html) diakses tanggal 10 Juni 2016 pukul 10.47 WIB.

³<http://ic-mes.org/politics/jurnal-komunikasi-internasional-indonesia-untuk-palestina> diakses tanggal 2 Juni 2016 pukul 09.52 WIB.

Tengah.⁴ Beliau mendesak para pemimpin dunia untuk ikut menyelesaikan konflik di Timur Tengah itu, yang dituding menjadi penyebab munculnya terorisme dengan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan resolusi mereka berkaitan dengan konflik di Timur Tengah. Presiden Megawati menyatakan keyakinannya, penyelesaian sengketa Arab-Israel akan menjadi kunci keberhasilan upaya memerangi terorisme internasional.

Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak upaya yang dilakukan beliau termasuk dalam pertemuan setingkat menteri negara-negara Asia Timur (The Second Conference of Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development, CEAPAD II) di Jakarta di bulan Maret 2014 menyerukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Bukti nyata dukungan Pemerintah SBY juga ditunjukkan melalui bantuan senilai lebih dari 22,2 Milyar yang terwujud dalam bentuk obat-obatan, alat-alat medis, sarana dan prasarana medis, serta kendaraan medis. Disamping dua hal tersebut, Indonesia juga mengirimkan para diplomatnya di berbagai konferensi internasional untuk ikut andil dalam penyelesaian dan perdamaian di Palestina, diantaranya keikutsertaan Indonesia dalam perumusan resolusi DK PBB terkait situasi di Jalur Gaza, keikutsertaan Indonesia dalam sidang IPU (International Parliamentary Union) yang diselenggarakan di Jenewa serta keikutsertaan Indonesia

⁴<https://elpakpahantaman.wordpress.com/2013/09/19/sikap-pemerintah-indonesia-terhadap-serangan-israel-ke-gaza-palestina> diakses pada tanggal 24 Mei 2016 pukul 11.29 WIB.

dalam konferensi rekonstruksi Gaza yang diselenggarakan di Mesir pada tanggal 2 maret 2009.⁵

Pada pemerintahan Jokowi, konsisten dukungan kepada Palestina ditunjukkan melalui KTT Luar Biasa OKI yang membicarakan Palestina dan Al Quds Al Sharif pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 di Jakarta, disertai dengan pembukaan Kantor Konsulat kehormatan di Amman.⁶

One Land, Two Peoples adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan konflik Palestina dengan Israel. Masing-masing mengaku sebagai pihak yang berhak atas tanah itu. Akibatnya mereka berjuang untuk memperoleh apa yang diakuinya sebagai milik kelompok. Setidaknya pernah ada empat kali perang, tahun 1948, 1956, 1967 dan 1973, sebagai akibat adanya konflik Palestina Israel.⁷

Ide *Land for Peace*, sebagaimana tersirat dalam Resolusi DK PBB No.242 (1967) dan diperkuat Resolusi no. 338 (1973), telah disepakati oleh sebagian besar negara. Ide ini sebenarnya cukup adil. Israel mendapat pengakuan Negara Arab, dan Palestina mendapatkan wilayah untuk mendirikan negara.⁸ Namun, Resolusi PBB juga bukan merupakan sebuah jalan keluar yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik tersebut.

⁵[http://www.indosejati.com/2016/03/fakta-fakta-kedekatan-indonesia-dengan Palestina.html](http://www.indosejati.com/2016/03/fakta-fakta-kedekatan-indonesia-dengan-Palestina.html) diakses tanggal 10 Juni 2016 pukul 10.47 WIB.

⁶http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160306_indonesia_jokowi_palestina Jokowi desak OKI berperan penyelesaian konflik Israel Palestina, diakses pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 19.34 WIB

⁷ M. Riza Sihbudi dkk. *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*. Bandung: PT. Eresco.1993.Hal.42.

⁸ Ibid, Hal. 43.

Hubungan antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, umumnya dikenal dalam kaitannya dengan aspek agama Islam dan masalah Palestina. Seperti diketahui, Indonesia mendukung perjuangan Bangsa Palestina untuk memperoleh tanah air mereka yang dicaplok kaum Zionis Israel.⁹

Kawasan Timur Tengah memang selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia. Pergolakan yang tidak henti-hentinya semakin menjadi perhatian sekaligus keprihatinan Bangsa Indonesia. Salah satu faktor penyebab tingginya perhatian pada kawasan itu adalah kedekatan emosional keagamaan antara Bangsa Indonesia dan negara-negara Timur Tengah.

Namun, dukungan Indonesia terhadap Palestina, selalu dikaitkan dengan faktor konstitusi dan bukan Islam. Menurut Leifer “Majelis Permusyawaratan Rakyat secara formal menegaskan kembali kebijaksanaan luar negeri yang bebas dan aktif pada bulan Juli 1966, dukungan diajukan terhadap perjuangan “Rakyat Arab Palestina untuk mencapai keadilan, kebenaran dan kemerdekaan” tanpa mengungkapkan sentimen kesamaan agama.¹⁰ Anak Agung Banyu Perwira juga berpendapat bahwa tanggapan Indonesia terhadap konflik Timur Tengah, seperti Perang Teluk I dan Isu Palestina bukan berdasarkan sentimen

⁹Ibid, Hal.145.

¹⁰Michael Leifer. *Indonesia's Foreign Policy*. Journal of Southeast Asian Studies. Vol.16, No.12. September 1985, pp. 325-326.1985.Hal. 201.

keagamaan. Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina adalah karena untuk kemerdekaan Palestina dari kolonialisme Israel.¹¹

Pendapat dengan jelas juga dinyatakan oleh Suharto dalam tulisan Leo Suryadinata, (November, 1987) bahwa sebagai suatu bangsa, yang bangga akan warisan perjuangan melawan pendudukan kolonial demi kemerdekaan nasional, kita bangsa Indonesia selalu memandang perjuangan Palestina sebagai suatu perkara suci, seperti perjuangan kita sebagai bagian dari gerakan global yang tidak dapat diingkari melawan kekuatan kolonial dan dominasi asing. Ia juga menyatakan, konflik di Timur Tengah hanya dapat diselesaikan jika rakyat Palestina diberi kemerdekaan atas negaranya dan Israel meninggalkan tanpa syarat seluruh wilayah yang diduduki, termasuk Jerusalem. Islam secara jelas tidak muncul dalam pernyataannya.¹²

Indonesia mendukung Arab adalah berdasarkan pada kalkulasi bijaksana kepentingan nasional. Direktur riset di kementerian luar negeri juga menyatakan bahwa Indonesia mendukung negara-negara Arab melawan Israel adalah berdasarkan prinsip keadilan, yangmana juga merupakan prinsip kebijakan luar negeri. Faktor kesamaan agama adalah sebuah tambahan saja.¹³

¹¹Anak Agung Banyu Perwita. *Indonesia and the Muslim World: Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Copenhagen: NIAS Press, 2007, pp. 222+ xvi. ISBN 10-87-911114-92-6, ISBN 13-978-87-911114-92-2. 2007. Hal. 112.

¹²LeoSuryadinata. *Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Midle East, and Bosnia*. University of California Press. Vol.35, No.3 (Maret, 1995), pp. 291-303.1995. Hal.293.

¹³Ibid.

Dari pernyataan- pernyataan tersebut, semua tertuju dengan alasan konstitusi, tidak ada yang mengatakan bahwa dukungan Indonesia atas Palestina adalah didasari oleh perjuangan Islam. Padahal menurut Riza Sihbudi hubungan Indonesia dengan Timur Tengah dan berbagai isu kawasan itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh faktor Islam.¹⁴ Tapi adakah peran Islam dalam pengaruh kebijakan Republik Indonesia terhadap perjuangan Palestina?

B. Rumusan Masalah

Selain alasan konstitusi, bagaimana peran Islam dalam Politik Luar Negeri Republik Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina era Presiden SBY dan Jokowi?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui alasan konsistensi Politik Luar Negeri Republik Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dari sudut pandang Peran Islam.

D. Landasan Teori

Peran Agama dalam Hubungan Internasional yaitu agama muncul sebagai identitas dan kekuatan untuk mempengaruhi perilaku politik negara baik itu permasalahan legitimasi maupun politisasi agama. Dengan penduduk mayoritas muslim, membuat Indonesia memiliki identitas Islam dan mengambil sikap untuk lebih condong mendukung Palestina. Hal ini

¹⁴Riza Sihbudi. *Indonesia- Timur Tengah : Masalah dan Prospek*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997, Hal. 13.

terlihat dengan penolakan Indonesia untuk menolak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan membangun hubungan dengan Palestina dengan keberadaan kantor perwakilan Palestina di Indonesia dan juga Indonesia membuka Konsulat kehormatan di Amman.

Philip Jenkins, seorang sarjana dari Pennsylvania State University, memprediksi bahwa ketika sejarawan melihat kembali abad ini mereka akan melihat agama sebagai bagian dari penggerak utama dan kekuatan destruktif dalam urusan manusia yakni mengarahkan sikap untuk kebebasan dan kewajiban politik, konsep kebangsaan dan tentu saja konflik dan perang. Seperti kejadian 11 September, konflik di Nigeria (Islam-kristen), konflik Yugoslavia (antara Orthodox Serb, Catholic Croats dan muslim Bosnian), hal ini, menurut Mark Juergens Meyer, menjadi jelas bahwa tidak mungkin memahami peristiwa dunia tanpa menempatkan agama ke dalam variable penelitian.¹⁵ Masuknya Indonesia dalam OKI sendiri menunjukkan bahwa Islam memiliki prinsip mendasar dalam penentuan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.

Menurut Fox and Sandler ada 4 variable yang menjelaskan peran agama dalam hubungan Internasional.¹⁶ **Pertama**, agama bisa mempengaruhi pandangan dunia individu dan kelompok yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikir dari pelakunya. Apakah kita

¹⁵Husnul Murtadlo. 2013. *Aspek Agama dalam Konflik Palestina dan Sikap Indonesia*. Diakses dari <http://husnulmurtadlo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel.html> Pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 09.30 WIB.

¹⁶Jonathan Fox and Shmuel Sandler. 2004. *Bringing Religion Into International Relations*. New York : Palgrave Macmillan. Hal. 176.

menyebut worldview, kepercayaan, norma, atau nama lain, ia adalah cara yang kuat dimana agama berkaitan dengan perilaku individu dan masyarakat. Kekuatan agama di aspek ini bisa dilihat ketika ia mengarahkan dan membatasi politik luar negeri melalui kepercayaan pembuat kebijakan dan kepercayaan serta harapan konstituennya.

Oleh karena itu, politik luar negeri juga bisa dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan keagamaan.¹⁷ Hal ini berlangsung melalui pandangan dunia berbasis keagamaan dari para pembuat kebijakan baik di negara sekuler maupun negara agama. Selain itu politik luar negeri juga bisa dipengaruhi melalui pandangan dunia berbasis keagamaan dari rakyat yang membatasi pilihan para pembuat kebijakan. Jika kebijakan dipandu oleh keyakinan agama maka otomatis hal itu akan memiliki legitimasi keagamaan bagi rakyat yang memiliki keyakinan sama. Sehingga di titik ini legitimasi keagamaan dan pandangan dunia keagamaan adalah *inexorably intertwined*.

Kedua, agama dipandang sebagai aspek identitas dan diyakini mempengaruhi jati diri seseorang. Ini memberi mereka kesan senasib dengan sesama pemeluknya. Akibatnya muncul rasa peduli dan tanggung jawab terhadap saudara seagama dengan basis solidaritas keagamaan. Ini juga bisa menjelaskan mengapa negara dengan agama yang sama punya kecenderungan tidak saling berperang. Selain itu, hal ini juga bisa

¹⁷Ibid, hal. 163.

menjelaskan mengapa konflik di suatu tempat bisa menyebar melalui jalur agama ke negara tetangga dan bahkan tempat lain di bumi.

Ketiga, agama adalah sumber legitimasi untuk mendukung maupun mengkritisi pembuat kebijakan. Sebagai sumber legitimasi agama bisa digunakan untuk mempersuasi pihak lain.¹⁸ Kekuatan mempersuasi ini sangat esensial bagi pembuat kebijakan. Agama bisa dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan luar negeri untuk mencari dukungan bagi kebijakan mereka dari rakyat termasuk politisi lain, pemilih serta pembuat kebijakan dan rakyat di negara lain. Sebaliknya, mereka juga bisa menggunakan agama untuk menentang kebijakan itu atau mendukung alternatif kebijakan lainnya.

Baik pembuat kebijakan maupun pihak oposisi di dalam politik dalam negeri maupun luar negeri bisa memakainya. Bahkan pembuat kebijakan yang memiliki keyakinan agama berbeda dibanding rakyatnya tidak ingin dinilai bertentangan dengan nilai itu. Terkadang bahkan pembuat kebijakan menggunakan *terms and images* agama untuk menjustifikasi tindakannya. Ini penting dicatat karna banyak ahli sekarang mempercayai bahwa nilai- nilai normatif termasuk nilai agama tengah memainkan peran penting yang meningkat dalam hubungan internasional. Bahkan kadang-kadang memotivasi agama dan sekuler bergabung.

Beberapa tokoh yang menekankan hal ini misalnya Joseph Nye yang mengemukakan konsep *soft power* pada 1990 yang memandang

¹⁸Ibid, hal 169.

agama dalam hubungan internasional sebagai *persuasive power* bagi kelompok yang sama. Tokoh lain seperti Shireen T. Hunter juga menyebut bahwa agama mempengaruhi hubungan internasional salah satu caranya dengan melegitimasi keputusan kebijakan dan mengumpulkan dukungan populer bagi kebijakan itu.¹⁹

Keempat, agama diasosiasikan dengan institusi-institusi formal yang bisa mempengaruhi proses politik. Dalam beberapa kasus institusi-institusi ini adalah aktor internasional. Dalam ranah domestik institusi-institusi ini memainkan peran dalam mendukung rezim, menentang rezim dan melobi rezim. Institusi-institusi itu juga bisa memainkan peran dalam mobilisasi politik.

Inilah yang dikatakan Haynes bahwa ada hal yang jarang dicatat tentang upaya agama mempengaruhi politik luar negeri melalui *soft power* dengan mendorong pemerintah untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan cita-cita agama.²⁰ Bahkan Fox dan Sandler dengan tegas menyebut bahwa pengaruh terbesar agama pada sistem internasional adalah melalui pengaruh signifikannya pada politik domestik sehingga agama menjadi kekuatan motivasi yang membimbing banyak pembuat kebijakan.²¹ Shireen Hunter juga menyebutkan bahwa pengaruh agama

¹⁹Shireen Hunter, Religion and International Affairs : From Neglect to Over- Emphasis. Written on April 7, 2010- 9:32 pm. www.e-ir.info/2010/04/07/religion-and-international-affairs-from-neglect-to-over-emphasis/ . diakses 14 Mei 2013 pukul 16.36 WIB.

²⁰Jeffrey Hynes, Religion and Foreign Policy Making in the USA, India and Iran : Towards a Research Agenda Third World Quarterly Vol.29, No.1 (2008) (pp. 143-165).

²¹Fox and Sandler, Op.Cit. Hal.168.

bisa dilacak pada aktivitas kelompok agama, yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku negara dalam sistem demokratis.²²

Berikut ini saya sampaikan Tabel Indikator dan Riset Pengaruh Agama :

Peran/ Pengaruh Agama (fox and Sandler)	Indikator
Sumber Wordlview	a. Agama memberi pengaruh terhadap persepsi atas kejadian dan tindakan para pembuat kebijakan. b. Agama memberi kepercayaan dan harapan konstituen yang membatasi pilihan pembuat

²²Shiren Hunter, Loc.Cit.

	kebijakan
Sumber Identitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Menegaskan siapa mereka b. Memberi feeling of affirmity c. Co-religious Solidarity
Sumber Legitimasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memobilisasi dukungan bagi kebijakan dari konstituen b. Meyakinkan pembuat kebijakan di negara lain c. Memobilisasi dukungan dari pembuat kebijakan negara lain d. Memberi batas mana kebijakan yang boleh/ pantas dan mana yang tidak e. Memberikan sarana untuk membenarkan kebijakan f. Alat mempersuasi pihak lain
Diasosiasikan dengan institusi Formal	<ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi keagamaan memberi tuntutan dan dukungan b. Organisasi keagamaan

	<p>melakukan lobby</p> <p>c. Organisasi keagamaan mengumpulkan dana dan menyerahkan kepada pihak lain</p> <p>d. Organisasi Keagamaan mempersuasi pemerintah</p>
--	---

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah tipe penelitian dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis pada peran Islam terhadap Politik Luar Negeri Republik Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Caranya adalah dengan mengumpulkan informasi terkait judul dan mencoba menganalisa dengan teori yang ada.

Sedangkan tipe kualitatif adalah penelitian dengan mengkolaborasikan antara penelitian di perpustakaan (Library Research) atau studi pustaka dengan penelitian lapangan (Field Reseach).²³

²³ Pedoman dan Petunjuk Penulisan Skripsi, FISIP Unwahas 2004.

2. Data dan Sumbernya

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan juga sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber langsung dari aktor-aktor terkait misalnya aktor negara dan Ormas. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, misalnya dari buku, makalah, jurnal, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk lebih mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka ataupun komunikasi melalui alat bantu komunikasi. Metode ini merupakan alat pengumpulan informasi secara langsung tanya jawab yang dilakukan peneliti terhadap responden yang dipilih sengaja oleh peneliti, dengan maksud agar dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Studi Dokumen

Teknik penulisan ini dengan cara membaca, mengamati, dan mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur

buku, internet, surat kabar, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data secara kualitatif dengan urutan :

- a. Reduksi Data, yaitu proses menyempurnakan data, baik mengurangi data yang dirasa kurang relevan maupun menambah data yang dirasa masih kurang.
- b. Display Data
- c. Pengambilan Data dan Verifikasi
- d. Penarikan Kesimpulan

Tujuan dari analisa data ini adalah menyajikan dan menganalisa fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I berjudul Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Gambaran Umum PLN RI terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

BAB III berisi Peran Islam dalam Politik Luar Negeri RI terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina Sejak Era Reformasi dilihat dari 4

variabel penelitian. Yaitu dari sumber worldview, sumber identitas, sumber legitimasi dan sumber yang diasosiasikan dengan institusi formal.

BAB IV Kesimpulan